

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kewajiban dan hak serta wewenang dimiliki oleh setiap wilayah otonom untuk mengelola dan mengawasi pemerintahan serta mengakomodasi publik dengan berlandaskan aturan yang berlaku, merujuk pada regulasi tentang pemerintah daerah pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menjalankan pemerintahan secara independen serta melayani masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mutu pelayanan, menciptakan keadilan dan pemerataan, serta meningkatkan daya saing daerah melalui penerapan otonomi daerah.

Gendut (2016) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kapasitas ekonomi daerah untuk secara berkelanjutan menghasilkan pembangunan kesejahteraan yang substansial namun tetap rentan terhadap persaingan domestik dan internasional. Daya saing suatu daerah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kemajuan dalam perekonomian yang bertujuan memperluas produksi barang dan jasa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Sukirno, 2002 dalam Yuni, 2018). Meskipun demikian, pemerintah telah menerapkan desentralisasi fiskal, namun kesiapan dan kemampuan setiap daerah dalam membiayai kegiatan operasional daerah berbeda-beda. Pemungutan pendapatan asli daerah yang optimal tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dalam meramalkan maupun realisasi pemungutan penerimaan daerah.

Untuk memenuhi keperluan pelaksanaan desentralisasi daerah, pemerintah daerah diberikan dana perimbangan yang merupakan pembagian dari APBN yang salah satunya terbagi sebagai dana alokasi umum. DAU diharapkan dapat digunakan secara efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Akibatnya, hal ini meningkatkan ketergantungan daerah pada dana federal, karena daerah-daerah saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai operasional mereka sendiri. Hal ini diperparah oleh korupsi yang merajalela dan manajemen keuangan yang tidak memadai.

Sumber daya moneter yang diperoleh pemerintah akan dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Belanja modal adalah salah satu metode untuk melakukan hal ini. Investasi pemerintah dalam aset tetap ditunjukkan dalam belanja modal.

Meskipun demikian, faktanya beberapa aset yang dibeli tidak terkait dengan tanggung jawab pelayanan publik dan mengalihkan investasi modal dari pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi tujuan utama.

Pemerintah membutuhkan kapasitas fiskal yang mencukupi agar otonomi daerah dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum melalui laporan realisasi APBD.

**Tabel 1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi**

KABUPATEN / KOTA	TAHUN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Modal (BM)	Jumlah Penduduk (JP)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Kabupaten Mandailing Natal	2019	98,758,815,330	816,400,130,000	206,392,843,130	447,287	5.30
	2020	90,454,777,180	751,402,758,000	138,152,200,870	472,886	-0.94
	2021	<b>144,515,140,680</b>	742,346,622,000	198,052,363,730	478,062	<b>3.20</b>
	2022	<b>93,973,877,160</b>	741,703,499,400	191,100,101,980	484,874	<b>4.34</b>
Kabupaten Padang Lawas	2019	44,680,490,438	541,104,708,000	204,458,003,516	281,239	5.64
	2020	44,055,621,274	<b>496,576,468,000</b>	143,366,541,808	261,011	<b>1.18</b>
	2021	22,019,196,815	<b>364,189,317,975</b>	48,072,426,211	261,011	<b>3.83</b>
	2022	46,693,352,048	485,798,148,640	133,493,699,077	267,275	4.61
Kota Binjai	2019	70,611,969,806	585,637,664,000	116,334,725,682	276,597	5.51
	2020	76,970,022,575	535,778,557,000	89,336,601,005	291,842	-1.83
	2021	69,409,613,123	532,627,031,000	<b>121,799,469,008</b>	295,361	<b>2.23</b>
	2022	75,461,229,703	530,035,930,817	<b>85,255,183,058</b>	300,009	<b>4.18</b>
Kota Tebing Tinggi	2019	105,233,206,364	432,026,491,000	153,577,322,071	<b>164,402</b>	<b>5.15</b>
	2020	92,285,195,862	393,452,394,000	149,776,465,844	<b>172,838</b>	<b>-0.70</b>
	2021	74,560,717,185	386,845,565,000	168,788,285,882	174,969	2.51
	2022	88,747,091,901	385,812,088,050	132,545,304,607	177,785	4.01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 memiliki PAD sebesar Rp. 144.515.140.680 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20. Namun, di tahun selanjutnya, PAD mengalami penurunan yang berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 4,34.

Dana alokasi umum di Kabupaten Padang Lawas adalah Rp. 496.576.468.000 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 364.189.317.975 pada tahun 2021. Hal ini berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 1,18 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,83 di tahun 2021.

Belanja modal di kota Binjai sebesar Rp. 121.799.469.008 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 85.255.183.058 pada tahun 2022. Penurunan ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 2,23 di tahun 2021 menjadi 4,18 di tahun 2022.

Jumlah penduduk kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebanyak 164.402 jiwa, meningkat menjadi 172.838 jiwa pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 adalah 5,15, yang menurun menjadi -0,70 pada tahun 2020, berlawanan dengan peningkatan jumlah penduduk yang disebutkan di atas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup signifikan diakibatkan terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, yang kemudian menurun menjadi 2,5% pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan oleh penurunan pendapatan daerah, berkurangnya permintaan domestik, menurunnya harga komoditas, dan terjadinya ketidakstabilan pasar keuangan yang pada akhirnya berkontribusi pada reduksi fiskal daerah.

Jumlah penduduk dimasukkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, dengan temuan Kartika, Ita, dan Jacline (2019). Penelitian ini bermaksud untuk menilai perubahan pertumbuhan ekonomi yang terdampak dari berubahnya empat variabel bebas yang ditetapkan.

Peneliti ingin untuk melakukan studi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara Tahun 2019-2022” dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan.

## 1.2 Teori Pengaruh

### 1.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

PAD adalah pemasukan yang diterima daerah yang dipungut dari sumber daya dalam

daerah tersebut (Ardhansyah, 2018: 94; Halim, 2004). Untuk mendanai kegiatan daerah, PAD mengacu pada pendapatan yang dikumpulkan di dalam daerah. Rifda Atiqoh Daulay (2020) menemukan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pendapatan asli daerah secara signifikan, sebanding dengan penelitian Ardhansyah Putra Harahap (2018). Dengan demikian, peningkatan PAD akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

#### 1.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah pusat mendistribusikan dana perimbangan yang salah satu bagiannya adalah DAU, sebagai porsi dana terbesar yang didistribusikan pemerintah yang ditujukan agar kemampuan fiskal setiap daerah terjamin untuk membiayai pengeluaran pemerintah. DAU bermanfaat dan berpengaruh cukup besar terhadap pembangunan ekonomi daerah, seperti yang diteliti oleh Ari Mulianta Ginting (2016). DAU yang meningkat akan diiringi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi juga.

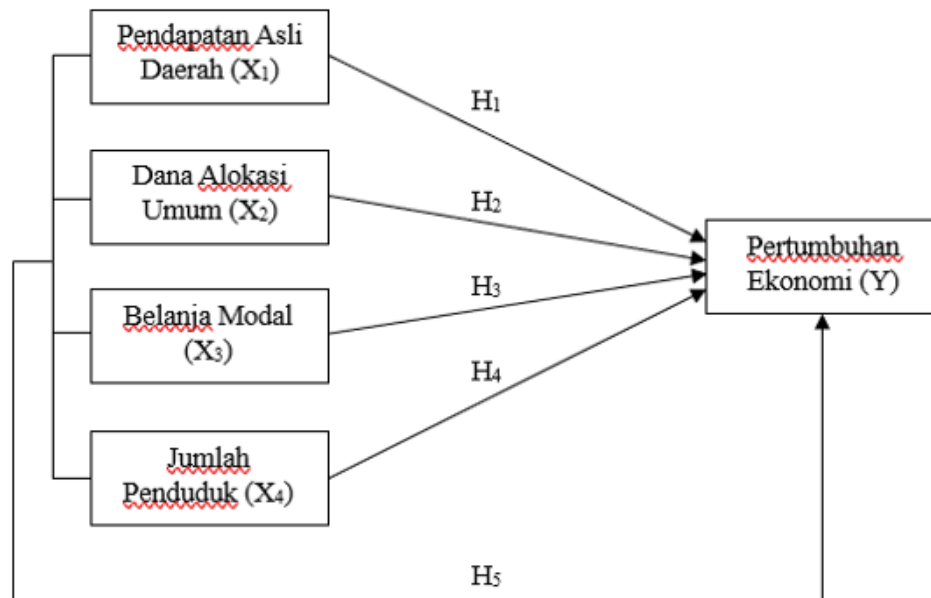
#### 1.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemakaian dana anggaran untuk pengadaan aktiva tetap fisik yang dapat digunakan untuk waktu yang lama disebut sebagai belanja modal. Nilai aktiva tetap adalah harga yang dikeluarkan ketika membeli/membangun aset, serta seluruh biaya yang berhubungan hingga aktiva tersebut siap untuk dipakai (Erlina, 2013 dalam Rifda, 2020). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi positif oleh pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Rifda Atiqoh Daulay (2020) dengan Utami dan Indrajaya (2019). Peningkatan investasi modal akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

#### 1.2.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Populasi mengacu pada banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah dalam satu waktu (Mulyadi, 2008 dalam Nanda & Khairil, 2020). Populasi yang besar semestinya bisa menghasilkan produk dalam kuantitas besar yang dibarengi dengan konsumen yang melimpah (Budi, 2021). Studi Budi Darma (2021) menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh parsial dan substansial terhadap pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pembangunan ekonomi.

### 1.2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### 1.2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berdasarkan kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah secara parsial kepada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatra Utara tahun 2019-2022.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari dana alokasi umum secara parsial kepada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatra Utara tahun 2019-2022.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja modal secara parsial kepada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatra Utara tahun 2019-2022.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk secara parsial kepada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatra Utara tahun 2019-2022.

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan jumlah penduduk secara simultan kepada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatra Utara tahun 2019-2022.